# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pentingnya infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah karena dengan infrastruktur yang memadai berdampak pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga meningkatkan akses produktifitas sumber daya yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu eksistensi infrastruktur jangan hanya dilihat dari segi kuantitasnya saja, tapi harus dilihat dari segi kualitasnya juga. Dalam konteks ini Taddoro (2006) menjelaskan bahwa “pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di negara berkembang seringkali terkendala oleh buruknya kondisi infrastruktur”. Dalam banyak kasus didapati bahwa pembangunan infrastruktur justru menjadi beban anggaran suatu daerah sehingga menghambat laju perekonomian sebagai akibat infrastruktur yang dibangun kualitasnya kurang baik.

Dalam realitasnya, ketersediaan infrastruktur yang minim seringkali menjadi penyebab utama mahalnya ongkos logistik dan rendahnya arus investasi masuk. Oleh karena itu maka pembangunan infrastruktur harus dilihat secara seimbang dan menjadi fokus utama pembangunan nasional. Dari pendapat Taddoro tersebut di atas terlihat bahwa Infrasturktur memiliki korelasi kuat dengan Pembangunan ekonomi suatu wilayah atau kawasan dimana wilayah dengan infrastruktur yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan yang lebih tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dalam pembangunan sebuah infrastruktur salah satu hal yang tatkala penting adalah penerapan konsep *costing* (penentuan biaya) dikarenakan untuk memastikan alokasi anggaran yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur akan lebih efisien dan efektif, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta pemerintah. Dengan menerapkan konsep *costing*  biaya yang terkait dengan proyek, mulai dari biaya investasi awal hingga biaya operasional dan pemeliharaan jangka panjang dapat diperhitungkan secara rinci dan detail sehingga dapat dijadikan landasan objektif bagi para pengambil keputusan untuk mengevaluasi apakah proyek infrastruktur tersebut layak dilaksanakan.

Dalam realita, banyak dijumpai infrastruktur terutama yang dibangun oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah yang mangkrak karena tidak selesai, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya atau cepat rusak. Dilain sisi banyak pejabat atau aparatur pemerintah yang ditangkap akibat praktek korupsi dalam pembangunan infrastruktur dan umumnya disebabkan karena adanya *marpk up* anggaran. Realitas ini menunjukkan penerapan konsep *costing* atau instrument akuntasi dalam pembangunan infrastruktur sangat penting. Dalam konteks ini, salah satu hasil penelitian terhadahulu oleh Ahmad Fadri Kurnia Mubarok (2012) dengan judul Analisis Biaya-Manfaat dalam Proyek Infrastruktur Publik menujukkan bahwa Implikasi dari penggunaan CBA dalam pengambilan keputusan infrastruktur publik sangat luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomis, CBA membantu memastikan bahwa sumber daya publik dialokasikan dengan efisien dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat. Dari perspektif sosial, CBA memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak proyek terhadap kesetaraan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang lingkungan, CBA membantu mengelola dampak proyek terhadap ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah daerah kepulauan yang membutuhkan banyak dermaga untuk saling berhubungan guna mendukung kegiatan pembangunan dan meningkatkan aktivitas ekonomi atau memperlancar roda perekonomi di wilayah kepulauan yang belum terjangkau moda transportasi laut representatif, aman, lancar dan selamat. Oleh sebab itu pemerintah Kabupaten pangkajene dan Kepulauan sedang giat-giatnya membangun infrastukrur dermaga karena meyakini bahwa keberadaan dermaga pasti memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi di sekitar wilayah dermaga, meningkatkan konektivitas antar pulau-pulau dalam wilayah terkait.

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki pulau sebabnyak 133 buah pulau 72 diantaranya berpenghuni, yang tersebar di empat Kecamatan Kepulauan yaitu Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas dan Kecamatan Liukang Tangaya diamana luas wilayahnya 80% merupakan wilayah perairan. Sesuai data yang berhasil dikumpulkan diketahui bahwa dermaga yang dibangun oleh Dinas Perhubungan berupa dermaga kayu sebanyak 57 unit tersebar di 50 pulau dan sebagian diantaranya tidak dapat difungsikan secara optimal karena pada waktu tertentu dimana saat air surut dermaga tersebut tidak dapat digunakan karena dangkal dan sebagian mengalami rusak. Dari data hasil Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang merupakan instrument yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep untuk menjaring informasi mengenai Infrastruktur Dermaga yang rusak atau kebutuhan dermaga yang perlu di bangun diketahui rata-rata jumlah dermaga yang diusulkan untuk di rehabilitasi sebanyak 15 unit, namun usulan tersebut tidak semuanya dapat diakomodir dalam anggaran Dinas Perhubungan karena platfom anggaran yang dialokasikan keppada Dinas Perhubungan terbatas. Pada tahun anggaran 2024 dari 15 unit dermaga yang diusulkan untuk direhabilitasi 13 unit yang dapat direalisasikan dalam ABPD/DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jumlah Dermaga yang diusulkan untuk direhab dan dibangun melalui Musrembang dalam kurung waktu 3 Tahun anggaran sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1  
Kondisi Proyek Pembangunan Sarana-Prasarana Kabupaten Pangakejene dan Kepulauan Tahun 2021-2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahun | Jenis Proyek | | Total Anggaran | Keterangan |
| Rehab | Bangun Baru |  |
| 1 | 2021 | 15 | 8 | 3,850,000,000 |  |
| 2 | 2022 | 11 | 6 | 2,850,000,000 |  |
| 3 | 2023 | 13 | 4 | 2,750,000,000 |  |

Sumber: Dinas Perhubungan Kab Pangkep , 2024

Mencermati data tersebut di atas menunjukkan bahwa beberapa dermaga yang dibangun oleh Dinas Perhubungan kurang layak karena rusak dan disisi lain ada kebutuhan masyarakat akan fasilitas dermaga yang layak. Dalam konteks ini, dengan pendekatan akutansi manajemen, penulis mencoba menelusuri lebih lanjut data yang ada untuk mengatahui faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pembangunan infrastruktur dermaga di Kabupaten Pangkajane dan Kepulauan dengan mempelajari data pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 dimana dari hasil pengamatan terhadap data anggaran tersebut ditemukan indikasi penyusunan anggaran pada DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum sepenuhnya menggunakan konsep *Costing* melainkan lebih condong menggunakan pendekatan estimasi sebagai terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 2   
Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pangakejene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Vol.** | **Anggaran** | **Realisasi** | **Selisih Anggaran** | **Keterangan** |
| **BELANJA MODAL** |  |  |  |  |  |
| 1. Pembangunan Dermaga P.Samatellu Lompo Mt.Walie | 1 paket | Rp 160,000,000 | Rp 158,490,000 | Rp 1,510,000 | Selisih terjadi karena pada saat penetapan harga satuan tiap komponen biaya pada realisasi belanja disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasaraan saat itu. |
| 2. Pembangunan Dermaga Maccini Baji | 1 paket | Rp 150,000,000 | Rp 149,300,000 | Rp 700,000 |
| **BELANJA PEMELIHARAAN** |  |  |  |  |
| Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi |  |  |  |  |
| 1. Pemeliharaan Dermaga P.Saugi Mt.Baji | 1 paket | Rp 170,000,000 | Rp 169,520,000 | Rp 480,000 |
| 2. Pemeliharaan Dermaga P.Gondong Bali Mt.Matae | 1 paket | Rp 160,000,000 | Rp 158,080,000 | Rp 1,920,000 |

Tabel 1. 2 di atas menunjukkan bahwa, terdapat 2 (dua) peket kegiatan rehab dan kegiatan pembangunan dermaga dengan koefiesien/volume yang sama yaitu 1 paket namun harga masing-masing berbeda baik pada kegiatan pembangunan maupun kegiatan rehabilitasi Dermaga. Dalam konsep *costing* seharusnya koefisien/volume harus diuraikan secara detail sehingga setiap komponen biaya dapat dilihat volume dan harga satuannya.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul penelitian “Analisis Implementasi Konsep *Costing* Kelayakan Pembangunan Infrastruktur Dermaga Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, masalah yang dapat dirumuskan untuk penelitaian ini adalah: Bagaimana penerapan konsep *costing* dalam pembangunan infrastruktur dermaga pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep *costing* dalam Pembangunan Infrastruktur Deramaga di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Dapat menambah pengetahuan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

1. Manfaat Praktis
2. Untuk memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam mengelola pembangunan infrastruktur.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait konsep *costing.*